

Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 4, No. 2, Oct 2015, p-ISSN: 2252-5793, hlm. 103-126

MODEL INTERNALISASI NILAI ANTI-KORUPSI MELALUI PENGAJARAN DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS FAKULTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Dede Rosadi¹, Ulil Amri Syafri², Didin Hafidhuddin³, Irfan Syauqi Beik³

¹Kementrian Agama Karawang Jawa Barat, Indonesia

²(*Corresponding author*) Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ulamris@uika-bogor.ac.id dan ulamris@yahoo.com

³Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Abstract

Corruption in Indonesia is very worrying. On the other hand, the efforts to combat corruption have not shown optimal results. On one side, there is the law on corruption, but on the other hand corruption persists. One of the efforts taken is through education that is considered strategic for prevention. Based on the decision letter of Kopertais Region II of West Java and Banten No.002/Kep.II/SK-1/IX/2011, the Faculty of Islamic Studies of Singaperbangsa State University of Karawang taken anti-corruption education courses as a compulsory subject. The focus of the problem in this study is internalization model of Anti-corruption value in Faculty of Islamic Studies of Singaperbangsa State University of Karawang. The specific aim of this study is to have a concept of internalization model of anti-corruption value through teaching in Islamic Higher Education properly and appropriately. The general aim of this study is to have a concept of internalization model of anti-corruption with Islamic worldview basic which can be implemented in Islamic Higher Education. The method used in this research is to use the *mixed method*, a combination of qualitative and quantitative approaches. The first method is qualitative descriptive approach, it was taken because this study used interviews, observation, and documentation as the primary data source. The quantitative data was analyzed using descriptive statistic with the technique of SEM (Structural Equation Modelling) application and validity test. Results of research on the anti-corruption lessons in Faculty of Islamic Studies shows that learning activities are held is limited to the transfer of the knowledge (cognitive). It yet emphasis on character formation (affective) and the moral consciousness in the resistance (psychomotor) against corruption. Model internalization of effective Anti-Corruption will appear if the learning patterns lead to pattern formation of student habits (habit formation) and modelling (role model). In addition, the model also should include learning objectives aimed at the establishment of Anti-corruption personality on students' personal and the application of Anti-corruption values in daily activities of life. The subject matter of the Anti-corruption education directed at theori of Hubud Hazards associated with the world, ascetic morality and honest or trustworthy. Methods and techniques used Qudwah learning and habituation. Evaluation of learning techniques directed at non-verbal and writing of the absorption of the material (matter avoid memorizing

concepts or more materials are digging of opinion) and affective tests. Tests were carried out on a model of internalization of Anti-corruption shows the evidence of the questionnaire with an average positive impact and significance of 75% and 25% are influenced by other variables. Therefore, based on the research that the model can be used with various limitations

Keyword: *Anti-corruption, value internalisation, higher education*

I. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi wabah yang menandai rutinitas kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis sejumlah survey, Indonesia pada 2012 berada di peringkat ke-118 dari 176 negara dengan skor 32. Skor ini naik dari skor Indonesia pada 2011, yaitu: 30. Di sini, Indonesia berada di dalam jajaran negara terkorup di dunia, yang sejajar dengan negara-negara terbelakang seperti Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. IPK Indonesia di bawah Singapura (peringkat 5 dunia dengan skor 87), Brunei Darussalam (peringkat 46 dunia dengan skor 55), Malayasia (peringkat 54 dunia dengan skor 49), Thailand (peringkat 88 dunia dengan skor 37), dan Filipina (peringkat 118 dunia dengan skor 34).¹Sementara itu, Denmark dan Selandia Baru menempati posisi teratas sebagai Negara paling bersih dari korupsi dengan skor masing-masing 93.²

Sementara menurut survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Hongkong, Indonesia disebut sebagai Negara paling korup di antara 16 negara yang disurvei di Asia tahun 2009 dengan skor 8.32, atau hanya 16.8% dari skor maksimal,³dengan indikator nol sebagai skor untuk paling bersih dan 10 untuk skor negara sangat korup.

Sementara itu, Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa korupsi di lembaga peradilan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, yang mungkin hanya bisa disamai oleh Meksiko. Bahkan, di mata orang-orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini korupsi di pengadilan, adalah yang terburuk. Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10. Skor 1 adalah yang terbaik dan skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas India yang memperoleh angka 9,26 dan Vietnam yang mendapatkan skor 8,75.⁴

Selain hasil survei dan laporan di atas, rata-rata lembaga penelitian/survei internasional yang khusus memiliki perhatian pada persoalan korupsi menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi.

Namun demikian, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini dipandang terlalu hanya menekankan dimensi kuratif, yakni penanganan tindak korupsi ketika hal itu telah terjadi. Upaya-upaya tersebut belum memasuki dimensi preventif, yakni upaya pencegahan praktik korupsi melalui sosialisasi dan pembentukan budaya anti-korupsi. Padahal, dimensi preventif inilah yang memiliki daya jangkauan kuat dan jauh bagi upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya kuratif dilakukan untuk jangka pendek saja, sementara upaya-upaya preventif dilakukan untuk jangka panjang,

termasuk guna membangun budaya bangsa Indonesia yang memiliki integritas serta anti-korupsi.

Pada titik ini, menurut Thomas Lickona, institusi pendidikan dipandang memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya-upaya pembentukan budaya anti-korupsi. Sebab, dalam institusi pendidikanlah, berbagai nilai dan norma masyarakat disosialisasikan kepada generasi muda. Melalui pendidikan ini, generasi muda mengalami proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada. Jika dalam institusi pendidikan, tidak ada upaya untuk membangun budaya integritas dan antikorupsi, maka bisa dipastikan generasi muda saat ini tidak akan memiliki perspektif kritis terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, jika budaya integritas dan antikorupsi sudah disosialisasikan sejak dini, maka besar harapan generasi muda ini memiliki perspektif yang tepat dan kritis terhadap praktik korupsi yang terjadi saat ini dan di masa mendatang.⁵

Persoalannya adalah sejauhmana institusi pendidikan memberikan respons yang tepat bagi upaya pembentukan budaya anti-korupsi ini? Fakta yang terjadi di dunia pendidikan justru menunjukkan sebaliknya. Berbagai hal yang mencerminkan kurangnya integritas tampak dalam perilaku insan pendidikan. Misalnya, ketika ujian semester dilaksanakan, banyak terungkap kasus mahasiswa yang menyontek jawaban ujian. Mereka melakukan itu karena takut tidak lulus. Hal ini juga hanya mungkin terjadi jika pihak dosen dan pelaksana ujian melakukan pembiaraan atasnya. Terkadang, pihak dosen bahkan secara sistematis membiarkan para mahasiswa untuk sekedar mengisi soal ujian tersebut. Ini belum termasuk kebiasaan buruk para dosen untuk terlambat mengajar atau bahkan membolos dari tugas mengajar.

Selain masih diliputi oleh perilaku yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi, dunia pendidikan di Indonesia juga masih belum memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan budaya antikorupsi, karena program pendidikan di Indonesia terlalu memberikan penekanan kuat pada bidang pengetahuan saja (aspek kognitif), tapi belum menyentuh bidang penguatan nilai-nilai atau budi pekerti (aspek afektif). Padahal, pembentukan budaya antikorupsi membutuhkan tidak saja pengetahuan tentang korupsi serta dampak-dampak destruktifnya, tapi juga dorongan atau kehendak untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.⁶

Di sini, pergeseran paradigma dari pendidikan yang semata-mata berorientasi pengetahuan kognitif ke pendidikan berorientasi nilai atau karakter tidak bisa ditawarkan lagi jika institusi pendidikan ingin berkontribusi maksimal dalam gerakan pemberantasan korupsi. Memang, pada 2010/2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) telah melakukan rintisan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada 125 satuan pendidikan yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota, pada 6 Provinsi di Indonesia. Kemudian, mulai 2011, semua satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia diharuskan untuk memulai mengimplementasikan pendidikan karakter. Hanya saja, implemmtasi pendidikan nilai atau karakter ini tampak berjalan agak lambat dan cenderung

tersendat atau jalan di tempat. Ini disebabkan karena belum adanya model implementasi yang jelas ihwal bagaimana menjalankan konsep pendidikan nilai atau katakter ini.⁷

Atas dasar masalah-masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses internalisasi nilai Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang sebagai bagian dari Perguruan Tinggi menjadi tempat yang dipilih untuk diteliti.

II. Metodologi

Pendekatan dalam penelitian ini adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu penelitian dengan pola gabungan untuk menganalisis data kualitatif kemudian dilanjutkan dengan analisis data kuantitatif yang didasarkan teori besar sebagai landasan pelaksanaan penelitian kemudian diverifikasi ke dalam indikator-indikator variabel hingga penentuan instrumen berupa kuesioner untuk pengumpul data dari lapangan.

Sebagai penelitian kombinasi, maka dua langkah dilakukan, pertama melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menurut Sugiyono diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif, lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif, maka digunakan paradigma sederhana yang terdiri dari satu variabel terikat (*dependent variable*) yakni keberagaman peserta didik dan satu variabel bebas (*independent variable*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama, yang dapat berupa kata-kata yang dihasilkan dari wawancara. Dalam hal ini yang akan menjadi sumber data primer utama adalah seluruh civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Adapun yang termasuk dalam kategori data skunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, silabus, dokumen-dokumen dan foto-foto ketika ke lapangan. Tentunya dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan ada data-data lain yang dapat dipakai jika ditemukan ketika dalam profesi penelitian.

Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan sesuai jenis dan kebutuhan penelitian. Data kualitatif dikelompokkan berdasarkan jenisnya sehingga terklasifikasi secara sistematis, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan inferensial.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Setidaknya terdapat tiga butir pokok yang harus diperhatikan dalam kurikulum antikorupsi : *pertama*, tujuan, hakekat, dan kebutuhan peserta didik yang secara ideal harus terhindar dari sikap koruptif; *kedua*, hakekat dan kebutuhan masyarakat dimana peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang menentang korupsi, *ketiga*, masalah pokok yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan masyarakat.

Dengan model ini tentunya mahasiswa akan semakin mendalam pengetahuan tentang korupsi karena setting atau sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Dengan tematis mahasiswa akan dilatih berpikir lintas disiplin dalam menyelesaikan permasalahannya.

Ada beberapa dasar yang menjadi pemikiran dalam menentukan atau menggagas kurikulum pendidikan anti korupsi. Tentunya dasar pemikiran ini selain berpedoman pada aturan atau kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah juga didasarkan pada sumber religi. Dengan demikian model kurikulum yang akan digagas merupakan model kurikulum yang memiliki dasar pemikiran yang baik. Adapun dasar pemikiran tersebut adalah:

1. Landasan Yuridis

Yang menjadi landasan Yuridis pelaksanaan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. TAP MPR RI Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang Uundang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 13 tentang KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- f. Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang Undang No. 7 Tahun 2006 sebagai pengesahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*);
- h. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- i. Instruksi Presiden no. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- j. Surat Keputusan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, Nomor:002/Kep.II/SK-1/IX/2011 tentang Buku Panduan Model Pengembangan Kurikulum Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta .

Hal-hal mendasar tentang fungsi, tujuan, pengembangan ilmu dan lainnya pada Perguruan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012. Di sini akan dikutip bagian-bagian dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi.

Pertama, Pasal 3 yang memuat asas pendidikan tinggi menyebutkan bahwa diantara asas-asas pendidikan tinggi adalah kejujuran, keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab.

Kedua, Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi, di antaranya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Ketiga, Pasal 5 tentang tujuan pendidikan tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan, di antaranya, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Keempat, Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: "pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa, keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang".

Kelima, Pasal 8 menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal ini yang membedakan pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Keenam, Pasal 13, tentang mahasiswa menyebutkan bahwa: "Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik." Secara umum, asas, prinsip, tujuan dan karakter pendidikan tinggi serta nilai-nilai yang dianutnya selaras dengan semangat anti korupsi. Jika ini dikembangkan secara sistematis dan sistemik, dapat menjadi tempat lahirnya dan tum-

buhnya ide-ide dan model-model pendidikan anti korupsi yang inovatif dan dinamis. Dengan kebebasan akademisnya, perguruan tinggi memiliki ruang yang luas untuk hal tersebut. Sejarah telah mencatat bahwa selama ini mahasiswa telah memainkan peran yang penting dan selalu berada di garis depan dalam gerakan-gerakan pembaharuan di Indonesia, termasuk gerakan antikorupsi.⁹

2. Dasar Religi

Tentunya dasar pemikiran ini bagi peneliti lebih penting dari yang lainnya karena basis pendidikan harus bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini disebabkan, tujuan utama dari Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri.¹⁰

Dengan demikian pendidikan dan pengajaran umat Islam itu haruslah bersumberkan kepada aqidah Islamiyah. Sekiranya pendidikan umat Islam itu tidak didasarkan kepada aqidah yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka pendidikan itu bukanlah pendidikan Islam, tetapi pendidikan asing.¹¹

3. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dalam suatu kurikulum digunakan sebagai dasar atau pijakan berpikir dalam menentukan tujuan atau materi yang cocok dalam kurikulum. Dalam filsafat terkenal dengan empat aliran yaitu *idealisme*, *realisme*, *pragmatisme*, dan *eksistensialisme*. Tentunya yang dijadikan acuan dalam pemikiran kurikulum ini tidak semua aliran filsafat tersebut digunakan, akan tetapi hanya diambil aliran idealismenya saja. Adapun penerapannya dalam pola berpikir idealisme dapat dilihat dari lima aspek yaitu *logika*, *etika*, *estetika*, *aksiologi* dan *epistemologi*.¹²

Menurut Ghofur bahwa kerangka dasar filosofis sementara untuk mengembangkan moralitas mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi di kampus, maka beberapa pendekatan perlu dipertimbangkan: 1) pembentukan kebiasaan (*habit formation*), 2) transfer pembelajaran (*transfer of learning*), 3) pemodelan (*role model*). Semua pendekatan ini cukup relevan dicermati dan diformulasikan ulang agar target *transfer of learning*, *transfer of values* dan *transfer of principle* dapat berinteraksi dengan persoalan realita sosial dikalangan mahasiswa.¹³

4. Dasar Psikologis

Psikologi dijadikan dasar dalam merancang kurikulum ini dikarenakan yang menjadi obyek maupun subyek kurikulum adalah mahasiswa.

Menurut Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi membagi ke dalam dua aspek yaitu:

a. Aspek Perilaku Individu

1) Sifat tamak/rakus manusia.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi

pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

3) Gaya hidup yang konsumtif.

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum *behavioris* mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.¹⁴

B. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini, yaitu:

1. Agar mahasiswa memahami jastifikasi dan pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi.
2. Menanamkan nilai dan sikap hidup Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa.
3. Menumbuhkan kebiasaan perilaku Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa.
4. Mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Pendidikan Anti Korupsi.
5. Menanamkan semangat anti korupsi pada setiap mahasiswa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari.
6. Membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil mahasiswa dalam melawan korupsi.
7. Menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap seluruh komponen bangsa.

C. Kompetensi Dasar Pendidikan Antikorupsi.

Kompetensi Dasar yang di tawarkan dalam matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi menekankan kepada tiga kopetensi yaitu :

1. Kemampuan penguasaan pengetahuan korupsi yang terkait dengan materi inti pendidikan Antikorupsi. Mulai dari pengertian korupsi dan prinsip-prinsip

antikorupsi, bentuk-bentuk/tipologi korupsi, factor-faktor penyebab korupsi, dampak massif korupsi terhadap eksistensi Negara bangsa, perspektif Islam dan antikorupsi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam sejarah di Indonesia, lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia, pemberantasan korupsi di Negara lain, dan pendidikan Antikorupsi sebagai *character building* kewarganegaraan.

2. Kemampuan mengekspresikan sikap antikorupsi yang indikatornya adalah munculnya kepekaan dan komitmen mahasiswa untuk menghindari penyimpangan perilaku korupsi. Hal ini bisa diawali dengan kepekaannya dalam menghindari *sikap betrayal of trust* seperti kemampuan tidak mencontek.
3. Kemampuan mengartikulasikan tindakan partisipatif antikorupsi seperti kemampuan melakukan monitoring dan control terhadap sistem dan penyelenggaraan administrasi sosial, Negara, dan pemerintahan. Keaktifan mereka di organisasi intra dan ekstra atau kegiatan non perkuliahan yang mengarah pada monitoring dan control terhadap tindak korupsi bisa dijadikan indikator penilaian.

D. Standar Kompetensi Peserta Didik

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat strata satu (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah:

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*)
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negative mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
 - b. Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek tular kelingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
 - c. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komperhensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada

penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

E. Materi atau Isi Kurikulum

Pada materi pendidikan anti korupsi alokasi waktu yang disajikan selama 1 x pertemuan yaitu 2 x 45 menit. Dikarenakan pada penyajian materi ini penekanannya diarahkan untuk menguasai pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang Pendidikan Anti Korupsi masih sangat diperlukan. Materi tersebut disusun dalam bentuk penyusunan silabus. Silabus merupakan rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta penyampaian (metode, media, sumber) dan penilaiannya. Silabus berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk satu mata kuliah tertentu di pendidikan tinggi.

F. Metode Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi

Metode yang dapat dikembangkan dalam materi pengajaran pendidikan anti-korupsi diantaranya:

1. Metode Dialog

Metode dialog adalah metode yang berdasarkan pada dialog atau dengan kata lain perbincangan dengan tanya jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan lagi, dikritik atau dibantah¹⁵. Mata ajaran yang terpaku pada model konvensional, yaitu lebih menekankan pada metode ceramah (*verbalistik*), layaknya cenderung monolog dan doktrinatif. Sehingga praksisnya, *sense of religion* (keinsyafan beragama) tidak dirasakan oleh para peserta didik, mesti dikembangkan dalam bentuk keakraban wacana melalui proses perenungan yang dalam dan proses dialogis yang produktif, kritis dan analitis.

Metode dialog merupakan pengembangan dari metode ceramah yang didominasi oleh pola komunikasi satu arah, yakni dari dosen kepada murid. Sehingga diperlukan pengajaran yang partisipatoris kontekstual, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berkeaktifitas. Kebebasan merupakan ekspresi pengalaman, perasaan, sikap dan keterampilan yang menekankan pada daya pikir kritis, tanggap dan kreatif dalam menghadapi sesuatu, tanpa ikatan atau dogma tertentu yang berpusat pada konteks realitas.

Prinsip dasar pendidikan model dialog bisa ditemui dalam berbagai surat dalam al-Qura'an. Contoh model dialog yang berefek pada lahirnya akhlak rasa syukur yaitu pada QS. Al-Waqi'ah :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ۗ ٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا فَظَلَّمْتُمْ نَفْسَكُمْ ۗ وَكُنْتُمْ لِآيَاتِنَا لَمَّاعِينَ ۗ ٦٥
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۗ ٦٦

Maka terangkanlah kepadamu tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadikanlah heran dan tercengang. (sambil berkata), Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa (QS.63-67)

Dari contoh ayat yang dikemukakan di atas memberikan ilustrasi bahwa metode dialog termasuk salah satu model yang efektif untuk proses pembelajaran. Dan model dialog yang tersirat dalam pendidikan al-qur'an akan memberikan didikan yang berpengaruh pada perasaan yang amat dalam bagi diri seorang yang beriman.

Kreativitas merupakan proses mental dan kemampuan tertentu untuk mencipta. Kreativitas juga merupakan pola interaktif antara individu dengan lingkungannya. Seseorang yang kreatif dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengatasi masalah (*problem sensitivity*), mampu mencipta ide alternatif untuk memecahkan masalah (*idea fluency*), mampu memindahkan ide dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain (*idea flexibility*). Hal ini bisa terwujud jika metode dialog (komunikasi dua arah) dalam proses belajar mengajar dijalankan.

Dengan metode pengajaran partisipatoris maka dapat membuka peluang peserta didik untuk bebas berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan. Sehingga dengan sistem dialog dan tidak dialog tersebut, bisa terlihat pola komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pembelajaran anti korupsi yang optimal baik pendidik maupun peserta didik harus bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, pendidik merasa bebas dan peserta didik merasa merdeka dari himpitan untuk menyuarakan kata hati, perasaan dan pendapatnya tentang persepsi korupsi.

Hal seperti ini yang perlu diterapkan dalam proses pendidikan anti korupsi di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam maupun lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan lembaga/yayasan/ormas Islam. Sehingga para peserta didik menjadi lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia global yang telah merambah ke semua sektor kehidupan.

Sementara dialog dengan orang lain dapat dilakukan dan muncul dalam berbagai bentuk. Dialog yang dinamis dan aktif adalah ketika dosen menempatkan mahasiswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dalam suatu topik. Kadang-kadang dosen juga bisa menciptakan cara kreatif terjadinya dialog dengan orang lain, seperti mengundang nara sumber yang akan berbicara tentang pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan di kelas atau di luar kelas. Dialog bisa dilakukan secara langsung melalui tulisan atau melalui email.

2. Model Kelompok Diskusi (In-Clas Discussion)

Sebagai makhluk sosial, peserta didik sejak kecil secara natural bermain dalam situasi berpasangan atau berkelompok. Perilaku ini dapat dilakukan dalam pengorgan-

isian belajar pada materi pendidikan anti korupsi. Dalam membahas permasalahan korupsi serta mencari solusinya peserta didik dapat bekerja berpasangan atau kelompok, baik dengan cara diskusi, demonstrasi, dan sebagainya.

Dengan metode ini, belajar menjadi lebih berarti karena dengan adanya interaksi antara peserta didik dan lingkungan. Sehingga secara konseptual, pendidikan anti korupsi tidak diartikulasikan sebagai sekedar membaca buku atau berita tentang korupsi, tetapi juga transformasi hubungan antara peserta didik, pendidik, sekolah dan masyarakat. Karena peserta didik akan lebih berarti bila ia tidak hanya sekedar belajar, ia harus bisa mengetahui dan mengamatinya sehingga ia memiliki semangat untuk mengubah realitas. Peserta didik harus banyak “membaca” dengan sungguh-sungguh realitas yang ada di sekitarnya. Karena lingkungan (fisik-sosial-budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar peserta didik. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat peserta didik merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram. Peserta didik harus dapat mengerti secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan orang lain dengan situasi dan problematika di sekitarnya. Dengan dihadapkan pada realitas sosial peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Sehingga mereka menyadari bahwa dalam dunia nyata ada dikotomi bahkan kontradiksi antara teori dan realitas. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa eksistensi manusia merupakan bagian dari pengembalian amanah dalam melakukan perubahan, sehingga mereka mampu berpikir kritis.

Dengan demikian metode diskusi menekankan aspek komunikasi inter-personal yang bersifat akademis dengan mata pelajaran yang sifatnya praktis, yang diterapkan dalam kehidupan. Sekolah berfungsi mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang efektif terhadap lingkungan yang transformatif, dan transformasi kehidupan harus senantiasa dipandang secara antisipatif dari terjadinya transformasi negatif.¹⁶

Melalui diskusi kelas tentang aspek moral dari suatu kasus korupsi mahasiswa dapat melihat lebih jauh akan alasan-alasan moral terkait korupsi, sekaligus mengemukakan pendapatnya dan ini akan meningkatkan kemampuan penalaran moral mahasiswa, dan selanjutnya akan membantu mahasiswa untuk membuat pertimbangan moral terhadap kasus tersebut. Dengan bermain peran tentang kasus korupsi, mahasiswa juga dapat menempatkan dirinya jika berada pada posisi koruptor dan bagaimana tanggapan mahasiswa kepadanya. Hal ini seperti jika dielaborasi dengan perencanaan yang baik akan memberikan makna dan pesan kepada mahasiswa bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Selanjutnya kreatifitas dosen dalam merancang pembelajaran mahasiswa sangat menentukan bagaimana pembelejaran anti korupsi dapat mencapai sasarannya.

3. Metode Kisah Qu’ani dan Nabawi serta Auliya (para Wali)

Metode kisah adalah metode cerita yang menekankan pada kejadian-kejadian masa lampau. Menurut Ahmad Tafsir¹⁷ kisah sebagai metode pendidikan amat penting, alasannya antara lain sebagai berikut :

- a. Kisah selalu memikat karena mengundang pembaca atau pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. Selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati pembaca atau pendengar tersebut.
- b. Kisah Qur'ani, Nabawi, dan Ulama serta wali, dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. Karena tokoh cerita ditampilkan dalamn konteks yang menyeluruh, pembaca atau pendengar dapat ikut menghayati atau merasakan isi kisah itu.
- c. Kisah Qur'ani mendidik perasaan keimanan dengan cara:
 - 1) Membandingkan berbagai perasaan seperti khauf, ridha, dan cinta;
 - 2) Mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada suatu puncak yaitu kesimpulan kisah;
 - 3) Melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu sehingga ia terlibat secara emosional.

Ditinjau dari dampak pedagogis kisah Nabawi tidak berbeda dari kisah Qur'ani, akan tetapi, bila ditinjau secara mendalam, ternyata kisah Nabawi berisi rincian lebih khusus seperti menjelaskan pentingnya keikhlasan dalam beramal, menganjurkan bersedekah, dan mensyukuri nikmat Allah. Begitu juga kisah para Auliya sebagai ibrah buat kita semua.

Ada suatu kisah ketika mendengar pernyataan Rosulullah SAW mengenai mantel yang di korupsi oleh Mid'am dapat menjadi penyebab ia masuk neraka, lelaki itu langsung memberikan tali pengikat sepatu yang dikorupsinya pada saat penaklukan Khaibar kepada Rosulullah SAW. Hadits yang menceritakan kasus Mid'am yang menggelapkan mantel dan seseorang yang tidak disebut namanya dan menggelapkan seutas atau dua utas tali sepatu, secara detail dikemukakan oleh Abu Dawud sebagai berikut: "Dari malik telah menyampaik kepadaku, dari Tsaur bin Zaid al-Dili, dari Abi al-Gais bekas budak Ibnu Muthi' dari abu Hurairah (bahwa) ia berkata : Kami keluar bersama Rosulullah SAW pada waktu penaklukan Khaibar. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak, yang kami peroleh adalah benda tak bergerak, pakaian, dan barang-barang. Ketika itu, seorang laki-laki dari Bani al-Dubaib bernama Rifa'ah bin Zaid menghadiahkan Rosulullah Saw seorang budak bernama Mid'am. Rosulullah SAW berangkat menuju Wadi al-qura. Ketika beliau sampai di wadi al-Qura, Mid'am sedang menurunkan barang-barang bawaan Rosulullah SAW tiba-tiba sebuah panah misterius (mengenai Mid'am) sehingga menyebabkan ia meninggal. Maka orang-orang yang melihat mengatakan " semoga masuk surga". Maka Rosulullah SAW bersabda : Tidak, demi Tuhan yang diriku berada di tangan-Nya. Sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan khaibar dari rampasan perang yang belyum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rosulullah, seorang laki-laki datang kepada Rosulullah SAW

membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Rosulullah SAW lalu mengatakan seutas takli sepatu sekalipun akan menjadi api neraka atau dua utas tali sepatu akan menjadi api neraka (seandainya tidak dikembalikan. (HR.Abu Dawud). Dari contoh kisah Di atas memberikan ilustrasi bahwa metode kisah termasuk metode yang efektif untuk proses pembelajaran dan membina kepribadian atau prilaku. Jika Nabi saja memberikan ilustrasi demikian maka sudah sepatutnya bagi para pendidik/dosen untuk mengikuti cara yang dikisahkan Nabi Muhamad SAW.

Disamping metode tersebut di atas, bahwa dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, merupakan suatu upaya pencarian bersama, menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, penegakan aturan (*tarhib*), *targhib* (motivasi), serta melakukan klarifikasi nilai.¹⁸

4. Metode demokratis

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan mahasiswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan dosen. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Dosen tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Dosen berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini mahasiswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap mahasiswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini mahasiswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

5. Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentative untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Melalui metode ini mahasiswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, mahasiswa diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian mahasiswa akan aktif sejalan dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan dosen. Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, mahasiswa juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari permasalahan yang muncul tersebut. Mahasiswa diajak untuk tidak cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan sikap. Mahasiswa diajak untuk melihat realita tidak hanya hitam-putih, tetapi lebih luas lagi yaitu adanya kemungkinan realita abu-abu.

6. Metode keteladanan (Qudwah)

Proses pembentukan kepribadian pada mahasiswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Dosen dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi mahasiswa. Dengan keteladanan dosen dapat membimbing mahasiswa untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari dosen akan amat berarti bagi seorang mahasiswa, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan dosen maka perilaku mahasiswa juga akan tidak benar. Dalam hal ini dosen dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup. Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun mahasiswa perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan. Misalnya, dosen perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.¹⁹ Menurut Ulil Amri, salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan integrasi iman, ilmu, dan akhlak adalah dengan adanya figur utama. Dialah sang pendidik yang menjadi sentral pendidikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa *qudwah* (teladan) merupakan aspek terpenting dari proses pendidikan. Para pendidik dituntut untuk memiliki kepribadian dan intelektualitas yang baik sesuai dengan Islam. Para pendidik dalam Islam adalah sebagai *qudwah* dalam setiap kehidupan pribadinya, pendidik jadi cermin bagi peserta didik.²⁰ Kalimat *qudwah* dalam konteks al-qur'an terdapat dalam surat al-ahzab ayat 21.

Menurut al-Bayanuni, *qudwah* memiliki tiga karakteristik, Pertama, mudah orang lebih cepat melihat kemudian melakukan daripada hanya dengan verbal. Kedua, minim kesalahan karena langsung mencontoh. Hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik para sahabat dan kaum muslimin. Ketiga, lebih dalam pengaruhnya, berkesan, dan membekas hati manusia dibanding teori.²¹ Sedangkan menurut Ahmad Tafsir²² Pertama, Metode pendidikan Islami berpusat pada keteladanan, yang memberikan teladan adalah guru, kedua, teladan bagi guru adalah Rasulullah. Mengapa peneladanan sangat efektif untuk internalisasi? Karena murid secara psikologis senang meniru, kedua karena sangsi-sangsi sosial yaitu seseorang akan merasa bersalah bila ia tidak meniru orang-orang disekitarnya. Dalam hal keteladanan Dosen dalam pembelajaran anti-korupsi harus jadi *role model*. Siswa cenderung meneladani pendidiknya, ini diakui oleh semua ahli pendidikan, baik barat maupun dari timur. Dasarnya adalah karena secara psikologis bagi anak memang senang meniru; tidak saja yang baik, yang jelepun ditirunya.

7. Metode Pembiasaan.

Metode Pembiasaan dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung mahasiswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh mahasiswa secara periodik.

Dengan cara ini mahasiswa diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama. Mahasiswa perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohaninya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai mahasiswa menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang. Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter kepada taraf yang baik, dalam artian terjadinya keseimbangan antara ilmu dan amal, maka al-Qur'an juga memberikan moded pembiasaan dan praktek keilmuan. Al-Qur'an sangat banyak memberikan dorongan agar manusia selalu melakukan kebaikan. Inti pembiasaan adalah pengulangan.

8. Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang mahasiswa. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif. Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu mahasiswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri mahasiswa. Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, (termasuk pembelajaran anti korupsi) adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh dosen, artinya dosen menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri mahasiswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri mahasiswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh dosen. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru. Pembelajaran anti korupsi pada prinsipnya adalah menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Maka pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi ini juga penting karena dengan cara penyampaian yang tidak tepat, tujuan yang akan dicapai juga sulit diperoleh. Supaya tujuan yang akan dicapai dapat diperoleh, dalam penyampaian nilai-nilai anti korupsi, harus digunakan cara-cara yang menarik dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

9. Penegakan aturan (tarhib)

Dalam al-Qur'an tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar menjauhi dan meninggalkan suatu perbuatan. Landasan aturannya adalah ancaman, hukuman, sanksi dari konsekwensi meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan dari ajaran agama. Model *tarhib* bukanlah hukuman itu sendiri, *tarhib* adalah proses atau metode dalam menyampaikan hukuman, dan tarhib itu sendiri ada sebelum suatu peristiwa

terjadi. Sedangkan hukuman adalah wujud dari ancaman yang ada setelah peristiwa terjadi. Dalam dunia pendidikan, model *tarhib* memberi efek rasa takut untuk melakukan suatu amal. Pendidikan yang menggunakan model *tarhib* adalah pendidikan yang melihat manusia tidak saja pada aspek akal dan jasmani, tapi juga melihat aspek hati atau jiwa manusia. Rasa takut yang ada pada diri manusia tersebut dididik menjadi takut yang bermakna tidak berani melakukan kesalahan atau pelanggaran, karena ada sangki dan hukumannya. Model *tarhib* yang digunakan dalam melakukan pendidikan akhlak dapat melahirkan rasa takut yang sering disebut dalam istilah *al-khuf*, yaitu takut kepada Allah SWT. Rasa takut model ini penting bagi setiap pribadi mukmin karena dengan rasa takut tersebut seorang mukmin berupaya menahan dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, ia mampu membenahi akhlak dan sikap perilakunya.²³ Sesungguhnya sehebat apapun metode yang dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran, akan tetapi penegakan aturan tidak dilaksanakan secara optimal, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran penerapan aturan yang telah dibuat oleh kampus perlu ditegakan. Peraturan-peraturan itu telah disampaikan sebelum mahasiswa menerima kontrak perkuliahan. Penerapan aturan kepada mahasiswa di antaranya diwujudkan dalam bentuk : tidak mencuri/mencontek, tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal, setiap mahasiswa dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*) dalam menyusun makalah, dll. Adapun penerapan aturan terhadap dosen diantaranya diwujudkan dalam bentuk tidak bolos mengajar.

10. Model Targhib (Motivasi).

Dalam merangsang dan mewujudkan interaksi antara peserta didik dengan dosen, perlu adanya energi berupa spirit (motivasi) dalam bahasa Arab disebut *targhib*. Tujuan untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu mengevaluasi atas dasar motivasi-motivasi yang diberikan oleh dosen. *Targhib* adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. *Targhib* bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. *Targhib* kerap diartikan dengan kalimat yang melahirkan keinginan kuat, membawa seorang tergerak untuk menggerakkan amalan. *Targhib* bukan saaja memiliki reaksi yang menimbulkan keinginan untuk menggerakkan sesuatu, tapi juga memunculkan tingkat kepercayaan pada sesuatu. Bisa saja dimaknai dengan rasa rindu yang membawa seseorang melakukan sesuatu amalan. Semua *targhib* yang disampaikan Allah kepada manusia adalah bersifat janji-janji yang pasti nyata. Sehingga model *targhib* adalah janji-janji Allah yang pasti akan terealisasi. Model ini didasarkan atas fitrah (sifat kejiwaan) manusia, yaitu sifat keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak menginginkan kepedihan dan kesengsaraan.

Targhib menjadi model pendidikan yang memberi efek motivasi untuk beramal dan mempercayai sesuatu yang dijanjikan misalkannya perkara tentang "kematian". Secara umum manusia takut akan hal kematian. Awalnya manusia memiliki rasa takut kehilangan, baik ditinggal seseorang yang dekat ataupun rasa takut pada kematian itu sendiri. Perasaan takut itu dilandasi oleh beberapa hal, seperti cinta pada dunia dan enggan meninggalkan kesenangan di dalamnya. Model *targhib* selalu memancarkan dan

memompa rasa semangat untuk berbuat. Dalam dunia pendidikan Islam model *targhib* ini mendorong menghadirkan perasaan penuh rindu kepada sesuatu yang diinginkan. Model *targhib* juga memunculkan rasa berharap yang besar terhadap janji yang disebutkan. Tentunya rasa berharap itu bukanlah angan-angan, karena rasa berharap selalu diiringi dengan amal, sedangkan angan-angan tidak diiringi oleh amal. Dalam proses pembelajaran anti-korupsi perlu adanya motivasi. Karena motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dosen. Dosen yang baik dalam mengajar selamanya kan berusaha mendorong siswa untuk beraktifitas. Dengan demikian, maka munculnya motivasi ditandai oleh adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang mungkin disadari ataupun tidak. Misalkan seseorang merasa lapar oleh karena ada perubahan yang terjadi dalam sistem pencernaan, oleh karena ada perubahan itu, maka muncul perasaan tertentu berupa ketegangan psikologis yang selanjutnya menimbulkan emosi. Berdasarkan uraian tersebut, maka motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab memang motivasi muncul karena karena kebutuhan. Seseorang akan terdorong untuk bertindak manakala dalam dirinya ada kebutuhan. Oleh karenanya dosen perlu menjadi motivator bagi peserta didik khususnya tentang akhlak antikorupsi, bagaimana selalu mendorong pada hal-hal yang baik, seperti peningkatan ibadah, mahasiswa selalu sholat berjama'ah, rajin tilawah al-qur'an, rajin berdo'a dan dzikir.

Dari beberapa model yang telah dipaparkan di atas tentunya, tidak bisa dilakukan bersamaan. Akan tetapi dengan banyaknya pilihan model yang dikuasai oleh para mahasiswa, maka proses belajar mengajar pendidikan anti-korupsi tidak akan monoton. Sebagai pisau analisis dalam pendidikan anti-korupsi adalah dengan menggunakan pembentukan kebiasaan (*habit formation*) dan permodelan (*role model*).

G. Durasi Waktu

Durasi waktu yang disajikan pada mata kuliah pendidikan anti korupsi selama satu jam pelajaran (2 x 45 menit). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pertama, Pada proses pengajaran materi Pendidikan Anti Korupsi, alokasi waktu yang disajikan adalah 1 jam pertemuan yaitu; 2 x 45 menit. Dikarenakan pada materi ini penekanan pemahaman pendidikan anti korupsi sangat diperlukan.

Kedua, Pengajaran materi Islamic Worldview pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, alokasi waktu yang disajikan yaitu selama 1 jam pertemuan. Yakni 2 x 45 menit. Hal ini dikarenakan pada materi Islamic Worldview berisi pemahaman tentang pandangan islam tentang korupsi serta dampaknya baik, bagi pribadi maupun masyarakat secara luas.

Dari kedua materi pada mata kuliah pendidikan anti korupsi tersebut, modal durasi waktu yang ditawarkan dalam proses pengajaran masing-masing disajikan sebanyak 1 jam pertemuan, yaitu; 2 x 45 menit = 90 menit.

H. Evaluasi Pembelajaran

Melakukan evaluasi pembelajaran mempunyai fungsi. Disamping tujuan dan fungsi selektif dan penempatan, evaluasi berfungsi diagnostik, karena hasil evaluasi digunakan untuk:

Pertama, mengetahui kelebihan dan kelemahan mahasiswa, kesulitan-kesulitan mahasiswa, sebab-musabab kelebihan dan kelemahan sehingga lebih mudah mencari pemecahan perbaikan penguasaan.

Kedua, evaluasi berfungsi sebagai pengukur peningkatan keberhasilan, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dijalankan dan sekaligus mencari dasar bagi perbaikan kurikulum dan program pendidikan.

Ketiga, evaluasi berfungsi sebagai pendorong atau motivator belajar para mahasiswa. Bagi mereka yang memperoleh hasil yang rendah, hasil evaluasi menjadi cambuk semangat untuk lebih berhasil dalam memahami hasil proses pembelajaran. Sebaliknya bagi mereka yang memperoleh hasil yang tinggi, hasil evaluasi menjadi motivator untuk bisa diamalkan pada kehidupan di masa yang akan datang.

Keempat, evaluasi dapat dijadikan sebagai penentu untuk mengetahui penguasaan kecakapan, pengetahuan dan sikap, perilaku dan mengetahui tingkatan prestasi mahasiswa.

Kelima, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur kualitas pengajaran dan menilai efektifitas prosesi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Dalam pelaksanaan evaluasi harus memiliki karakteristik tes atau ujian tersendiri. Secara umum, karakteristik ujian yang baik harus memiliki karakteristik tiga K yaitu: kejujuran, keseimbangan, dan kejelasan. Diantara adanya karakteristik ujian jujur, jika bahan ujian sama dengan bahan yang diajarkan, bahan ujian harus sama tujuan atau kompetensi pembelajaran, tingkat kesulitan ujian harus sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Dikatakan adanya keseimbangan jika bobot ujian sama dengan waktu yang digunakan untuk mengajar, jumlah ujian harus sesuai dengan waktu yang disediakan, ujian dimulai dari yang paling mudah kepada yang paling sulit, dan tipe ujian bervariasi. Dikatakan adanya kejelasan bila perintah dan instruksi ujian jelas, urutan ujian sama dengan bahan yang diajarkan, tulisan soal dan kata-kata ujian jelas.

Diantara sekian banyak bentuk evaluasi, diantaranya penilaian yang akan digunakan terdiri dari penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN). Namun demikian evaluasi yang paling dominan yang akan digunakan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi ini adalah evaluasi model non tes. Adapun evaluasi model non tes tersebut adalah:

Pertama, evaluasi melalui observasi. Observasi ini dilakukan langsung oleh para dosen untuk mengetahui pemahaman atau kepribadian para mahasiswa secara langsung. Bentuk observasinya bisa observasi langsung atau observasi tidak langsung. Observasi langsung dilakukan oleh dosen dengan cara wawancara atau dialog dengan para

mahasiswa. Sedangkan model observasi tidak langsung yang diisi oleh para mahasiswa dengan cara membuat lembar observasi yang diisi oleh para mahasiswa. Dengan demikian akan diperoleh hasil dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari para mahasiswa.

Kedua, model evaluasi praktek. Adapun cara mengevaluasinya dengan cara simulasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Dalam simulasi ini peserta diberikan pemahaman secara matang mengenai pendidikan anti korupsi, sebab dalam pendidikan anti korupsi ini merupakan hal yang penting. Dalam hal ini para dosen menguji kemampuan mahasiswa dalam mempraktekan pendidikan anti korupsi. Pada dasarnya ujian berfungsi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa yang berarti mengukur efektifitas perkuliahan. Namun bagi sebuah matakuliah mengenai tata nilai semacam Anti-korupsi, sulit untuk mengukur kompetensi mahasiswa hanya berdasarkan ujian. Penilaian keseluruhan memang bisa meliputi beberapa aktifitas, namun ketika ujian harus diadakan dalam ruang lingkup akademis, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian:

1. Soal menghindari hapalan konsep atau tiori
2. Soal lebih bersifat menggali opini atau sikap atau perspektif anti-korupsi mahasiswa misalnya dengan memberikan kasus atau mahasiswa mencari kasus.
3. Bentuk ujian beragam: *take home test*, debat, dan lain-lain.

I. Validasi

Validasi ini digunakan untuk mengetahui validitas atau keabsahan eksperimen pada setiap program untuk dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Dalam pembuatan model kurikulum pada penelitian ini dapat divalidasi pada dua program yaitu; validasi program kurikulum dan validasi program proses pembelajaran. Adapun kedua eksperimen program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Materi Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Untuk mengetahui dampak dari aplikasi kurikulum pendidikan anti korupsi, peneliti menyebarkan angket dan soal pertanyaan kepada 231 responden. Untuk melihat indikator secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawasan Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan tanggapan tentang pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut:

Pertama, mengetahui definisi korupsi. Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, mengetahui definisi korupsi, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 31,2 %, paham (P) 62,3 %, dan biasa saja (KD) 6,5 %;

Kedua, Memahami faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi. Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, memahami faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 31,2 %, paham (P) 57,6 %, biasa saja (KD) 10,0 % Kurang paham (KP) 1,3 %;

Ketiga, mengetahui dampak masif korupsi. Berdasarkan hasil responden secara umum menyatakan paham (SP) 48,1 % paham (P) 47,6 % biasa saja (KD) 4,3 %;

Keempat, memahami dan menghayati bahwa hukuman dalam Islam bagi pelaku tindak korupsi sangat berat, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 26,8%, paham (P) 66,2 %, dan biasa saja (KD) 6,9%.

Berdasarkan pada prosentasi pemahaman mahasiswa terhadap materi wawasan tentang korupsi di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa Karawang yang diaplikasikan pada proses pembelajaran melalui pembuatan kurikulum sangat signifikan terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.

b. Wawasan Islamic Wordlvieu tentang harta halal dan haram

Berdasarkan tabel di atas, materi wawasan Islamic worldvieu tentang harta halal dan haram bila didasarkan pada indikatornya maka dapat diprosentasikan sebagai berikut :

Pertama, mengetahui hakekat harta halal dan haram. Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, mengetahui hakekat harta halal dan haram, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 37,7 %, paham (P) 54,5 %, dan biasa saja (KD) 7,8 %;

Kedua, Memahami akhlak mencari rizki yang halal. Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, memahami akhlak mencari rizki yang halal, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 31,2 %, paham (P) 62,3 %, biasa saja (KD) 6,5 % .;

Ketiga, mengetahui dampak negatif harta haram untuk keluarga. Berdasarkan hasil responden secara umum menyatakan sangat paham (SP) 38,1 % , paham (P) 51,5 % , dan biasa saja (KD) 10,4 %

Prosentasi pemahaman mahasiswa pada materi kurikulum islamic wordlvieu sangat tajam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak pembelajaran materi islamic wordlvieu yang diidentifikasi pada proses internalisasi nilai signifikan terhadap pemahaman mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.

c. Memahami Akhlak Islam

Berdasarkan data di lapangan, materi wawasan Akhlak Islam tentang bahaya hubudunya, akhlak zuhud, akhlak jujur/amanah bila didasarkan pada indikatornya maka dapat diprosentasikan sebagai berikut :

Pertama, mengetahui bahaya hubudunya . Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, mengetahui hakekat harta halal dan haram, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 32,5 %, paham (P) 55,8 %, biasa saja (KD) 11,7;

Kedua, Memahami akhlak mencari rizki yang halal. Berdasarkan hasil responden yang tercantum dalam tabel tersebut, memahami akhlak mencari rizki yang halal,

secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 31,6 %, paham (P) 55,8 %, biasa saja (KD) 11,7, dan kurang paham(KP) 0,9 % .;

Ketiga, mengetahui dampak negatif harta haram untuk keluarga. Berdasarkan hasil responden secara umum menyatakan sangat paham (SP) 52,4 % , paham (P) 35,5 % , dan biasa saja (KD) 12,1 %

Berdasarkan hasil tabel di atas prosentasi pemahaman mahasiswa pada materi kurikulum Akhlak Islam sangat signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapak pembelajaran materi Akhlak Islam yang diidentifikasi pada proses internalisasi nilai setelah diujikan signifikan terhadap pemahaman mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.

2. Validasi Proses Pembelajaran

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat terjadi melalui usaha mendengar, membaca mengikuti proses petunjuk, mengamati, memikirkan, menghayati, meniru, mengawasi atau mencoba sendiri dengan pengajaran atau latihan. Adapun perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar relatif tetap dan bukan hanya perubahan yang bersifat sementara. Tingkah laku mengalami perubahan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kebiasaan, keteladanan, sikap dan aspek perilaku lainnya.

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan mahasiswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreatifitas dosen akan membuat mahasiswa lebih mudah mencapai target belajar. Maka proses pembelajaran matakuliah Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan; pertama, pembentukan kebiasaan (*habit formation*), dan kedua, permodelan (*role model*).

Dalam *role model* dan *habit formation* ini, pendidikan antikorupsi memberi perhatian sebagai berikut :

Pertama, pendidik (dosen) haruslah menjadi seorang model nilai dan sekaligus menjadi mentor nilai dari peserta didik (mahasiswa). Tanpa adanya peran itu, akan sangat sulit untuk menciptakan proses pengkondisian nilai dan konkretisasi bagi peserta didik;

Kedua, pendidikan di dalam kampus haruslah menjadi melting pot bagi terintegrasinya fungsi tri pusat pendidikan nilai : keluarga, kampus, dan masyarakat. Fungsi kampus seperti itu lebih mendesak lagi saat ini karena modernisasi telah berpengaruh terhadap minimalisasi peran pendidikan keluarga. Dengan begitu, segala yang dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh mahasiswa, baik dikampus maupun di luar kampus, secara koheren telah menjadi pranata pendidikan atau proses internalisasi nilai;

Ketiga, pendidikan nilai tidaklah berhenti hanya sebagai pendidikan wacana, tetapi ia harus menjadi pendidikan yang berorientasi pada praktek. Untuk melihat urgensi sifat jujur di dalam masyarakat dan berapa rumit dan banyaknya praktek korupsi, misalnya mahasiswa dapat diajak untuk melihat langsung proses jalanya suatu pengadilan korupsi yang hangat dan sedang digelar.

Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, bahwa model internalisasi nilai antikorupsi di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang) diperoleh temuan penelitian berupa kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Proses Internalisasi nilai pendidikan Anti-Korupsi di Fakultas Agama Islam Unsika, terdapat kendala pada proses pembelajarannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor: *pertama* matakuliah pendidikan anti-korupsi, mata kuliah baru belum tersedianya sarana dan prasarana. *kedua*, keterbatasan kemampuan dosen dalam menyuguhkan materi bahan ajar, *ketiga*, antusias para mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah, *keempat* kurikulum perlu penyempurnaan. Oleh karena itu proses internalisasi pembelajaran matakuliah pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan menggunakan pembentukan kebiasaan dari semua pihak dan permodelan (ketauladanan dari para dosen), dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan, melalui proses pembelajaran.
2. Adapun dampak pembelajaran matakuliah pendidikan Antikorupsi menunjukkan bahwa mahasiswa mulai mengaplikasikan materi nilai-nilai antikorupsi dalam berbagai kegiatan di kampus, baik kegiatan akademik maupun keorganisasian. Sebagai langkah membudayakan sikap antikorupsi, mahasiswa aktif dalam berbagai forum diskusi permasalahan antikorupsi, kritis dan tanggap dalam setiap tindakan korupsi di lingkungan sekitar. Serta aktif memberikan pendapat mengenai pemecahan masalah tindakan korupsi yang terjadi. Terbukti dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan adanya hubungan asosiatif antara internalisasi nilai dengan korupsi sebesar 75 % dan sisanya sebesar 25 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Referencess

-
- ¹www.kpk.go.id 21/3/2013
- ²http://www.ti.or.id/cpi2010_table_source, diakses tanggal 4/5/2011
- ³Bambang Widjoyanto (et,al), *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*,(Jakarta:Mizan Publika, 2010),hlm..92.
- ⁴Johan Budi, *Menyalakan Lilin di Tengah kegelapan: 4 Tahun KPK*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 4.
- ⁵Tentang hal ini, Lih., Thomas Lickona, *Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter); Bagaimana Sekolah Dapat memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- ⁶Tentang paradigma pendidikan komprehensif yang meliputi berbagai ranah kecerdasan manusia ini, lih. Howard Gardner, *Multiple Intelligences: The Theory in Practice* (New York: HarperCollins, 1993) dan Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* (New York: Bantam Books, 1996).
- ⁷Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.
- ⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, hlm. 49.
- ⁹<http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model>. *Pendidikan antikorupsi di per dosenan tinggi ilam. mikrokulturisasi*. Diakses pada tanggal 11 Nopember 2014.
- ¹⁰Lihat Didin Hafidhudin, *Silbus tafsir maudhu'i program Doktor Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat*. Menurutnya; bahwa tujuan pendidikan Islam tersebut yaitu *pertama*, Menjadi hamba allah secara Total. *Kedua*, manusia diciptakan oleh Allah sebagai Khalifahtullah. *Ketiga*, mampu melaksamahasiswaan Amanah Allah s.w.t. *keempat*, Manusia sebagai Makhluk yang Mulia. *Kelima*, menjadi manusia yang pandai bersyukur. *Keenam*, Sebagai Makhluk Sosial. *Ketujuh*, Memiliki kemampuan beramal secara optimal dan ihsan dalam kehidupannya.
- ¹¹An-Nawid sebagaimana dikutip oleh Ramayulis dalam bukunya *ilmu pendikan islam* (2011:192) mempertegas dengan menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran umat islam itu haruslah bersumberkan kepada akidah islamiyah. Menuntutnya, sekiranya umat islam itu tidak didasarkan kepada aqiqah yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, maka pendidikan itu bukanlah pendidikan islam, tetapi pendidikan asing.
- ¹² S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta. Bumi Aksara. Cet. Ke 6, 2010, hlm. 14-19.
- ¹³ Syaiful Amin Ghofur, *Merancang Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 01 No. 01 Juni 2009 ISSN 2085-3033.
- ¹⁴Lihat Buku *Pendidikan Anti Korupsi untuk Per dosenan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. 2011 p. 47-48.
- ¹⁵ Hasan Langgulung, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm. 565.
- ¹⁶<http://rugbuning-wordpress.com/210/06/5/membangun> paradigma-pendidikan antikorupsi Diakses pada tanggal 10 Nopember 2014.
- ¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 209.
- ¹⁸ Elwina, Marcella. 2008. *Pendidikan Anti Korupsi*. Diunduh 14 Nopember 2014 (<http://web.pangudiluhur.org/html/artikel.php?h=41>).
- ¹⁹ Lihat dalam *Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*. Kementerian agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat madrasah. 2013. P.15.
- ²⁰ Ulil Amri Syari, *Pendidikan Karakter berbasis Al-Qur'an*, Depok, 2012 hlm. 140.
- ²¹ Muhammad Abu Fath Al-Bayanuni, *Al-Madkhal ila'ilm Ad-dakwah*, Baiurut: Muassah Ar-Raisalah. 1416H/1991, hlm. 275.
- ²² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung, 2012, hlm. 213.
- ²³ Ulil Amri Syafri, *Pendidikan karakter berbasis al-Qur'an*, Depok, 2012, hlm. 122.